

PEREDARAN VITAMIN TANPA IZIN EDAR MELALUI TRANSAKSI E-COMMERCE TOKOPEDIA: TANGGUNG JAWAB SIAPA?

(Vitamins Distribution without Permit through Tokopedia E-Commerce Transactions: Whose Responsibilities?)

Jerry Shalmont, Grace I. Darmawan, Dora Dominica

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Gedung D Lantai 4, M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15811

e-mail: jerry.shalmont@uph.edu, grace.darmawan@uph.edu, doradominica17@gmail.com

Abstrak

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pengawas memiliki kewajiban untuk mengawasi peredaran segala hal yang berkaitan dengan obat dan makanan, karena hal ini menyangkut kehidupan masyarakat. Namun, fungsi pengawasan tentu tidak mungkin hanya diimplementasikan oleh BPOM, melainkan diperlukan kerja sama koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di sektor farmasi maupun *e-commerce*. Sejak pandemi COVID-19, konsumsi vitamin masyarakat Indonesia semakin meningkat. Dikarenakan adanya kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat, mayoritas transaksi pembelian barang, tidak terkecuali vitamin dilakukan melalui transaksi *online* melalui *e-commerce*. Kemudahan ini pada saat yang sama membuka celah maraknya penjualan vitamin tanpa izin edar di berbagai *e-commerce*. Vitamin tanpa izin edar tentu saja merugikan segala pihak terutama masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini akan fokus untuk mengkaji potensi kontribusi masing-masing *stakeholders* dalam menekan maraknya peredaran vitamin tanpa izin edar terutama di *e-commerce* Tokopedia selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dimaksudkan untuk melihat mekanisme apa saja yang dapat diimplementasi oleh para *stakeholders* selain pengawasan yang selama ini sudah dijalankan oleh BPOM. Transaksi pembelian secara *online* tentu saja akan lebih sulit untuk dikontrol dari sisi keaslian produk yang diperdagangkan karena vitamin tanpa izin edar biasanya baru diketahui keasliannya ketika barang sudah sampai ke tangan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai kerangka hukum sampai dengan kontribusi masing-masing pemangku kepentingan secara aktif yang mencakup pelaku usaha maupun konsumen. Pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual.

Kata Kunci: bpom, vitamin tanpa izin edar, pengawasan, *e-commerce*

Abstract

Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) as a supervisory agency has the obligation to oversee the circulation of all matters relating to drugs and food, because this concerns people's lives. However, the supervisory function is certainly not possible only to be implemented by BPOM but requires coordination with stakeholders both in the pharmaceutical and *e-commerce* sectors. Since the COVID-19 pandemic, Indonesian people's consumption of vitamins has been increasing. Due to the policy of limiting community mobilization, most purchases of goods, including vitamins, are carried out through online transactions through *e-commerce*. Vitamins without marketing authorization are detrimental to all parties, especially the public as consumers. This research will focus on assessing the potential contribution of each stakeholder in suppressing the rampant circulation of vitamins without distribution permits, especially in *e-commerce* during the COVID-19 pandemic. This is intended to see what mechanisms can be implemented by stakeholders other than the supervision that has been carried out by BPOM. In online purchase transactions, it will be more difficult to control in terms of the authenticity of the products being traded because vitamins without a distribution permit are usually only known for their authenticity when the goods have arrived in the hands of consumers. This research is expected to help provide information on the legal framework up to the active contribution of each stakeholder which includes business actors and consumers. The approach that will be used is the legal and conceptual approach.

Keywords: bpom, vitamins without marketing authorization, supervision, *e-commerce*

A. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan sektor farmasi sebesar 14% antara sebagian besar industri lain yang mengalami penurunan di masa pandemi COVID-19, pada kuartal ketiga tahun 2020. Tingginya permintaan produk farmasi dari obat sampai vitamin secara tidak langsung membuka kesempatan kepada pihak tidak bertanggungjawab untuk menjual produk-produk tersebut tanpa izin edar. Peredaran tanpa izin edar ini semakin sering kerap terjadi mengingat kebiasaan belanja dari masyarakat itu sendiri sudah beralih ke transaksi *online*.¹ Banyak pihak yang menjadi korban, bukan hanya kalangan awam, bahkan kalangan praktisi sempat menjadi korban.²

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa obat palsu adalah obat yang dijual menggunakan nama terdaftar untuk meraup keuntungan besar. Kandungan zat aktif di dalamnya tentu saja tidak sama dengan aslinya.³ Berdasarkan definisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat palsu merupakan obat yang meniru identitas produk obat lain yang telah memiliki izin edar dengan memakai kode QR dan label palsu.⁴ Beberapa referensi di media *online* mengajarkan cara mengidentifikasi produk vitamin asli maupun palsu melalui pemindaian *barcode*, banyaknya *typo* pada keterangan produk atau cara penggunaan, model dan

warna kapsul, serta pengawet (*silica gel*) yang digunakan.⁵

Dalam menanggapi isu ini, beberapa *e-commerce* menyatakan posisinya untuk menindak para pelaku yang menjual produk tanpa izin edar di platformnya. JD.ID berani mengiklankan tidak memasarkan barang palsu. Shopee dan Tokopedia mengambil langkah konkrit dengan cara menutup toko yang memiliki indikasi kuat menjual produk kesehatan seperti obat dan vitamin tanpa izin edar. Selain itu, Shopee dan Tokopedia juga bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan investigasi jika ada indikasi pemalsuan. Sebagai tambahan, Tokopedia menggandeng BPOM untuk mengawasi tidak hanya peredaran, tetapi juga mengawasi pengiriman, dan juga promosi, serta iklan penjualan obat dan makanan di platformnya dengan lebih intensif. Tokopedia dan BPOM telah sejak lama secara berdampingan mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dan teliti dalam bertransaksi. Literasi masyarakat adalah benteng terdepan dalam memerangi peredaran obat-obatan ilegal. Untuk memastikan keamanan transaksi, *e-commerce* memiliki tim internal untuk memantau produk yang dijual agar sesuai dengan regulasi.

Di beberapa *e-commerce*, pelaporan produk yang diduga palsu misalnya vitamin, dapat melaporkan melalui fitur 'Laporkan produk ini' di laman produk, dan/atau penjualnya

¹ Fitra Safrezi, "Makin Marak Peredaran Obat Dan Vitamin Palsu Di Masa Pandemi," *Kata Data*, last modified 2021, accessed September 2, 2021, <https://kata.data.co.id/safrezi.fitra/indepth/613897dced0ea/makin-marak-peredaran-obat-dan-vitamin-palsu-di-masa-pandemi>.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ BPOM, "Waspada Obat Palsu Dan Obat Online", [https://www.pom.go.id/new./browse./more./issue./12/](https://www.pom.go.id/new./browse./more./issue./12;); Agustinus Mario Damar, "Waspada Peredaran Vitamin Palsu, Begini Modus Penjualannya", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4609938/waspada-peredaran-vitamin-palsu-begini-modus-penjualannya>.

⁵ Safrezi, "Makin Marak Peredaran Obat Dan Vitamin Palsu Di Masa Pandemi."

melalui tombol 'Laporkan Pengguna' di laman toko. Tokopedia memiliki layanan pengajuan komplain apabila barang yang diterima tidak sesuai.⁶ Melalui pelaporan ini, masyarakat juga turut berperan aktif menjaga ekosistem belanja *online* lebih aman dan bertanggung jawab di samping pengawasan dari pelaku usaha maupun BPOM.⁷ Jika melihat sisi negatif, peredaran vitamin tanpa izin edar jelas merugikan tidak hanya konsumen, tetapi juga produsen obat, dan negara. Produk medis yang sudah kadaluwarsa rentan dipalsukan dan berisiko untuk dikonsumsi. *mClinica* menyatakan bahwa diakibatkan lemahnya *monitoring* terhadap rantai pasok menjadi salah satu faktor penyumbang sulitnya obat palsu diberantas.⁸ Para *stakeholder* di industri farmasi harus memiliki kerjasama yang kuat, selain melalui penerapan teknologi terbaru yang mampu mendeteksi produk palsu, edukasi terhadap apotek dan konsumen langsung untuk mempersempit ruang gerak peredaran obat tanpa izin edar, selain inspeksi pasar secara berkala oleh BPOM. Penelitian ini fokus pada mekanisme pengawasan oleh BPOM secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan *e-commerce* untuk melihat aspek yang perlu ditingkatkan sehubungan dengan peredaran vitamin tanpa izin edar dalam transaksi *online* mengingat kewajiban persyaratan keamanan diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020

mencakup pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian hukum yang merupakan penelitian menggunakan kerangka hukum *know how*, yang di mana memiliki tujuan untuk memecahkan isu hukum, juga untuk mendapatkan apa yang seharusnya dilakukan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada.⁹ Dalam penelitian ilmu hukum, salah satu metode penelitian yang dapat digunakan yaitu penelitian normatif-empiris, yang bertujuan untuk dapat meneliti permasalahan hukum yang bersifat bukan hanya normatif namun juga meneliti dari sisi aspek teknis dalam pengimplementasian peraturan hukum yang sudah ada oleh masyarakat.

Disebabkan karena tidak ada yang dapat menjelaskan mengenai efektifitas hukum namun tanpa terlebih dahulu membicarakan hukum dalam tataran normatif atau *law in books* dan hukum dalam tataran realita atau *law in action*. Sebab tanpa membandingkan kedua variabel tersebut tidak mungkin seseorangpun dapat mengukur tingkat keefektifan hukum itu sendiri.¹⁰ Sehingga diharapkan dengan penggunaan kedua pendekatan tersebut dapat menjawab permasalahan terkait maraknya peredaran vitamin tanpa izin edar khususnya melalui

⁶ Elsa Catriana, "Tokopedia Tutup Puluhan Ribu Toko Yang Terbukti Jual Vitamin Palsu," *Kompas*, last modified 2021, accessed November 27, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/09/15/162122126/.tokopedia-tutup-puluhan-ribu-toko-yang-terbukti-jual-vitamin-pal.su>.

⁷ Caesar Akbar, "Shopee Bakal Tutup Toko Yang Jual Obat Dan Vitamin Palsu," accessed October 27, 2021, https://bisnis.tempo.co/read/1484322/shopee-ba.kal-tutup-toko-yang-jual-obat-dan-vitam.in-palsu?page_num=2.

⁸ Integrity Indonesia, "Kerugian Karena Obat Palsu Capai 46 Milyar Rupiah," accessed November 27, 2021, <https://www.integrity-indon.esia.com/id/blog/2019/10/23/kerugian-karena-obat-pals.u-capai-46-m.milyar-rupiah/>.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁰ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Rechtsvinding* 1, no. 1 (2012): 23.

transaksi *e-commerce* Tokopedia. Analisis kualitatif dalam penelitian artikel ini dilandasi dengan peraturan hukum yang sudah berlaku dan kemudian melihat fakta yang terjadi sebenarnya di masyarakat.

C. Pembahasan

Peredaran obat dan vitamin tanpa izin edar bukan hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Berdasarkan Data Interpol, setidaknya pada Mei 2021 mereka sudah melaporkan pihak berwenang di 92 negara, dan juga telah menutup setidaknya 113.000 toko online dan situs web yang didapati menjual obat dan produk medis tanpa izin edar, termasuk masker dan alat tes Covid-19.¹¹ Pengurus Harian YLKI, Agus Suyanto mengatakan per Juli 2021 aduan belanja online meningkat signifikan di mana pengaduan kasus belanja *online* kedua terbanyak sebesar 22,7% setelah jasa perbankan dan keuangan sebesar 28,5% dan pinjaman *online* sebesar 13,2% di urutan ketiga.¹²

Perlindungan konsumen merupakan permasalahan berkaitan dengan kepentingan hidup manusia. Konsumen perlu dilindungi karena konsumen merupakan pihak yang lebih lemah apabila dibandingkan dengan produsen selaku pelaku usaha dikarenakan: (a). Ketergantungan pada suatu produk tinggi;

dan (b). Lemahnya pengetahuan terkait proses produksi produk.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan payung hukum bagi konsumen, tujuan UUPK untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, kemandirian, dan kepedulian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri.¹⁴ Para pihak diatur dalam UUPK terdiri dari setidaknya 2 pihak yaitu pertama, konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa terkhusus untuk dirinya sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan,¹⁵ kemudian kedua, pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik badan hukum atau bukan yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi baik itu berupa barang dan/atau jasa.¹⁶

Setiap pihak yang ada dalam UUPK memiliki hak dan kewajiban, adapun hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha itu sendiri diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 UUPK. Secara singkat, hak konsumen untuk rasa aman dan nyaman¹⁷, tidak mengkhawatirkan keselamatannya saat mengkonsumsi suatu produk, mendapatkan barang atau jasa dengan kondisi yang benar, jelas, dan jujur sesuai dengan kondisi dan jaminan yang

¹¹ Kamran Dikarma, "113 Ribu Situs Penjual Obat Dan Produk Medis Palsu Ditutup," *Republika*, last modified 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qudzz3382/113-ribu-situs-penjual-obat-dan-produk-m.edis-palsu-ditutup>; Safrezi, "Makin Marak Peredaran Obat Dan Vitamin Palsu Di Masa Pandemi."

¹² Reynas Abdila, "YLKI: Pengaduan Obat Vitamin Palsu Masuk Dua Besar," *Tribun*, last modified 2021, accessed January 20, 2022, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/18/ylki-pengaduan-obat-vitamin-palsu-masuk-dua-besar>.

¹³ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hal. 2.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Indonesia, 1999).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

dijanjikan¹⁸, untuk didengarkan pendapat atas keluhan atas barang dan/atau jasa.¹⁹ serta hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian²⁰. Selain hak, kewajiban konsumen seperti membaca petunjuk informasi terkait prosedur pemakaian atau pemanfaatan dari barang atau jasa²¹, juga mengikuti upaya penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa.²²

Selain konsumen, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha yaitu menerima pembayaran atas kesepakatan terkait dengan yang diperdagangkan, mendapatkan juga perlindungan hukum atas tindakan para konsumen yang memiliki itikad tidak baik, dan melakukan pembelaan apabila terjadi sengketa. Pelaku usaha mempunyai sejumlah kewajiban antara lain beritikad baik saat melakukan kegiatan usaha, di mana pelaku usaha harus memberi informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan mutu produk barang atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.²³ Setiap pelaku usaha juga wajib memberikan kesempatan pada konsumen untuk mencoba barang/jasa, memberikan jaminan garansi atas barang, memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.²⁴

Pasal 98 (1) UU 36/2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Sebagai implementasi dari aspek keamanan, sediaan farmasi baik itu obat, bahan untuk obat, maupun obat tradisional, dan kosmetika sekalipun wajib memiliki izin edar. Vitamin atau suplemen makanan masuk dalam kategori obat.²⁵ Suplemen makanan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan, mengandung setidaknya satu bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, ataupun bahan lain yang punya nilai gizi dan efek fisiologis.²⁶

Maraknya peredaran vitamin tanpa izin edar menunjukkan adanya itikad buruk pelaku usaha. Upaya penanganan banyaknya peredaran vitamin tanpa izin edar bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, kontribusi para pemangku kepentingan lainnya juga merupakan hal yang substansial. Konsekuensi hukum peredaran vitamin tanpa izin edar dapat dilihat dari Pasal 197 UU 36/2009, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

¹⁸ Ibid., Pasal 4 ayat (3).

¹⁹ Ibid., Pasal 4 ayat (4).

²⁰ Ibid., Pasal 5.

²¹ Ibid.

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

²³ Ibid., Pasal 6.

²⁴ Ibid., Pasal 7.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan* (Indonesia, 2009), Pasal 1 ayat (4), Pasal 98 ayat (2), dan Pasal 106 ayat (1); Vidya Vidya, "Vitamin Dan Suplemen Untuk Daya Tahan Tubuh," last modified 2020, accessed March 3, 2022, <https://medicastore.com/berita/2698/vitamin-dan-suplemen-untuk-daya-tahan-tubuh,.n>.

²⁶ Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan* (Indonesia, n.d.).

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00. Beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* yaitu BPOM, Tokopedia sebagai salah satu pelaku *e-commerce* terbesar di Indonesia, konsumen, sampai dengan asosiasi. Kontribusi setiap pemangku kepentingan akan dijabarkan secara detail:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Menteri Kesehatan untuk mengawasi bidang obat dan makanan.²⁷ Obat dan makanan yang diawasi oleh BPOM mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.²⁸ BPOM menyelenggarakan fungsi antara lain melakukan pengaturan melalui regulasi dan standarisasi; lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara produksi yang baik; evaluasi produk sebelum beredar di pasaran; pengawasan pasca pemasaran; pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi, melakukan penyidikan dan penegakan hukum; melaksanakan pre-audit

dan pasca-audit terhadap iklan dan promosi produk yang beredar; melakukan riset internal pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan; serta komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat termasuk peringatan ke masyarakat.

BPOM dipimpin oleh Kepala Badan dan memiliki struktur organisasi.²⁹ Dalam struktur organisasi BPOM yang mengurus vitamin adalah Deputi bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, yang membawahi beberapa direktorat yaitu:

- (1) Direktorat Standarisasi, yang menyusun kebijakan sampai dengan pengawasan di bidang standarisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi;³⁰
- (2) Direktorat Registrasi, yang mengawasi pre-market bidang pendaftaran produk sampai dengan iklan serta evaluasi uji klinik dan praklinik;³¹
- (3) Direktorat Pengawasan, yang mengawasi peredaran produk,³² dan
- (4) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, yang mengedukasi pengetahuan masyarakat.³³

Apabila ditemukan peredaran vitamin tanpa izin edar, Deputi Bidang Penindakan,

²⁷ Presiden Republik Indonesia, *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN* (Indonesia, 2017).

²⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik, *PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN* (Indonesia, 2020).

²⁹ Ibid.

³⁰ Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, "Tugas Pokok Dan Fungsi," accessed March 5, 2022, <https://standarpangan.pom.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

³¹ SIREKA BPOM, "PROFIL DIREKTORAT," accessed March 5, 2022, <https://sireka.pom.go.id/general/profile>.

³² Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, "Kenali Suplemen Kesehatan," accessed March 5, 2022, <https://ditwasotsk.pom.go.id/post/kenali-suplemen-kesehatan>.

³³ "Badan Pengawas Obat Dan Makanan - Republik Indonesia," accessed September 28, 2021, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/structure>.

yang terbagi dalam 4 direktorat khusus yang bertanggung jawab:

- (1) Direktorat Cegah Tangkal, melalui media sosialnya contohnya Instagram mengajak masyarakat untuk melaporkan temuan produk ilegal.³⁴
- (2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pelaporan di bidang intelijen.³⁵
- (3) Direktorat Siber Obat dan Makanan, mengawasi penyelewengan, juga penin-

dakan apabila terbukti terjadinya kejahatan siber di bidang obat dan makanan.³⁶

- (4) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, melakukan penyidikan dugaan tindak kejahatan di bidang obat dan makanan.³⁷

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dari pusat sampai ke daerah, BPOM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT)³⁸. Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM dipimpin oleh masing-masing Kepala UPT Badan POM.³⁹ Perbedaan tugas dan fungsi antara BPOM pusat dan UPT selain dari cakupan wilayah kerjanya yaitu:

Tugas dan Fungsi	Badan POM	Balai Besar POM, BALAI POM, dan LOKA POM
Penyusunan kebijakan	Menyusun kebijakan serta implementasinya dalam skala nasional	Tidak dapat menyusun kebijakan dalam skala daerah maupun nasional
Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan aturan obat dan makanan sebelum dan selama peredaran; 2. Koordinasi pengawasan obat dengan instansi pemerintah dan UPT BPOM; 3. Mengatur bimbingan teknis dan pengawasan obat dan makanan; 4. Pengawasan peredaran obat dan makanan secara nasional; dan 5. Menindaklanjuti keluhan terkait pengawasan obat dan makanan di skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program pengawasan obat sesuai arahan pemerintah pusat; 2. Koordinasi pengawasan obat dan makanan dengan BPOM pusat; 3. Pelaporan pengawasan ke pemerintah pusat. 4. Mengawasi peredaran secara regional; dan 5. Memberi edukasi tentang peredaran obat dan makanan.

³⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik, "Direktorat Cegah Tangkal," accessed March 19, 2022, <https://www.instagram.com/p/CDa36bppGI4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

³⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik, *Direktorat Intelejen Pengawas Obat Dan Makanan*, n.d., accessed March 19, 2022, <https://www.instagram.com/p/CDa36bppGI4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

³⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik, *Direktorat Siber Obat Dan Makanan*, n.d., accessed March 19, 2022, https://www.pom.go.id/new/files/2022/RKT/Pusat/RKT_Direktorat_Siber_Obat_dan_Makanan_2022.pdf.

³⁷ Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, *Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan*, n.d., accessed March 19, 2022, https://qms.pom.go.id/sites/default/files/QSC_01830_Direktorat_Penyidikan_Obat_dan_Makanan.pdf.

³⁸ Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, "Mengenal UPT Lingkungan Badan POM," last modified 2022, accessed March 29, 2022, <https://www.instagram.com/p/CfVhgOwvrdN/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

³⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik, *Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (PerBPOM 22/2020)* (Indonesia, 2020).

Penindakan terhadap pelanggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran; dan 2. Memberikan sanksi administratif. 	Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran, kemudian berkoordinasi dengan BPOM Pusat.
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan izin edar sesuai standar persyaratan; dan 2. Penetapan sanksi administratif pelanggaran produk, sarana / fasilitas distribusi obat dan makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi produk, sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan untuk dilaporkan ke pemerintah pusat; 2. Pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan.

Vitamin hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).⁴⁰ CPOB mencakup berbagai aspek produksi dan pengendalian mutu, yang juga meliputi keseluruhan rangkaian pembuatan suplemen makanan di mana pemenuhan standar dibuktikan melalui sertifikat.⁴¹

Terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi suplemen makanan yaitu dimulai dari penggunaan bahan yang harus bermanfaat sesuai dengan jumlah dan komposisi bahan yang dikandungnya, penerapan CPOB, penandaan yang memberikan informasi lengkap sampai dengan bentuknya yang tidak dimaksud untuk pangan.⁴² Semua ini dimaksudkan demi menjamin standar keamanan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suplemen makanan yang telah diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar melalui pendaftaran.⁴³ Mengingat suplemen makanan tidak hanya berasal dari dalam negeri, konsumsi suplemen makanan impor pun cukup tinggi di Indonesia. Sebagai antisipasi memastikan keamanan vitamin yang beredar, Pemerintah melalui BPOM mengeluarkan Perka BPOM 30/2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar.⁴⁴ Selain Izin Edar, juga harus memenuhi ketentuan

⁴⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik, *Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik.*, <https://www.pom.go.id/new/files/2018/pedoman/indonesia-gmp-guideline.pdf>.

⁴¹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik, *KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.23.3644 T E N T A N G KETENTUAN POKOK PENGAWASAN SUPLEMEN MAKANAN* (Indonesia, 2004), Pasal 1 angka 3.

⁴² Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik, *KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.23.3644 TENTANG KETENTUAN POKOK PENGAWASAN SUPLEMEN MAKANAN*.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (1).

⁴⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA*, 2017.

peraturan perundangan di bidang impor.⁴⁵ Untuk memastikan kualitas vitamin yang diimpor aman untuk dikonsumsi, Pasal 6 ayat (1) mengatur pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Edar atau kuasanya. Industri farmasi pemegang Izin Edar dapat menunjuk industri farmasi lain atau pedagang besar farmasi importir sebagai pelaksana impor Obat, dengan pelulusan mutu Obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang Izin Edar.⁴⁵

Dalam praktiknya, melihat tren peningkatan konsumsi vitamin dari 35,1% menjadi 58,6%, maka BPOM melakukan patroli siber untuk obat serta vitamin tanpa izin edar di berbagai *e-commerce* rutin setiap minggunya. Ketika BPOM menemukan obat atau vitamin tanpa izin edar, maka BPOM akan mengirimkan tautan produk tanpa izin edar ke *e-commerce* untuk diblokir dan dihapus.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Balai Besar POM (BBPOM) Bandung, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, dan LOKA POM (LOKA) Kota Surakarta, ada rasa keprihatinan karena kesadaran masyarakat masih belum 100% tentang banyaknya vitamin tanpa izin edar dan juga produk lainnya seperti kosmetik, obat tradisional, dan bahan makanan,⁴⁷ padahal produk-produk tersebut

dikonsumsi dan tidak ada yang tahu dampak apa yang akan terjadi ke depannya.⁴⁸ Fondasi pengawasan peredaran vitamin tanpa izin edar tidak dapat dibebankan hanya pada Pemerintah melalui BPOM⁴⁹, tetapi juga konsumen dan produsen.⁵⁰ Baik BPOM pusat dan UPT sudah melakukan patroli siber secara rutin untuk memantau produk yang diperjualbelikan di *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Elevenia, Blibli, maupun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter,⁵¹ kemudian ditindaklanjuti bagian penindakan dengan penarikan konten produk.⁵² BPOM juga melakukan operasi intelijen seperti patroli luring dengan pemeriksaan rutin ke gudang-gudang *e-commerce* berdasarkan berbagai informasi yang didapat dari patroli siber, aduan masyarakat, dan aduan lintas sektor yang diduga memproduksi dan/atau mengedarkan vitamin tanpa izin edar.⁵³ Pemeriksaan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan bisa sampai 4 (empat) kali seminggu. Untuk langkah penegakan hukum, BBPOM berwenang untuk mengeledah dan menyita barang bukti, memeriksa saksi dan tersangka yang akan dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.⁵⁴ Penyelesaian berkas perkara

⁴⁵ Ibid., Pasal 2 ayat (2).

⁴⁶ Ibid., Pasal 6 ayat (2).

⁴⁷ Balai Besar POM Surabaya, "Patroli Siber, Langkah Deteksi Dini Tingkatkan Efektifitas Pengawasan Obat Dan Makanan," last modified 2020, accessed April 3, 2022, Patroli Siber, Langkah Deteksi Dini Tingkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.

⁴⁸ Hasil interview dengan Bapak M. Fajar Arifin selaku Kepala LOKA POM Surakarta, pada 2 Juni 2022

⁴⁹ Hasil interview dengan Ibu Ernita selaku bagian Penindakan BBPOM Bandung, pada 10 Mei 2022

⁵⁰ Hasil interview dengan Bapak Naufal, selaku bagian Penindakan BBPOM Semarang, pada 23 Juni 2022

⁵¹ Hasil interview dengan Bapak M. Fajar Arifin selaku Kepala LOKA POM Surakarta, pada 2 Juni 2022

Hasil interview dengan Ibu Meliza selaku, bagian Informasi dan Komunikasi Infokom BBPOM Surabaya, pada 6 Juni 2022

⁵² Hasil interview dengan Bapak Naufal, selaku bagian Penindakan BBPOM Semarang, pada 23 Juni 2022

⁵³ Hasil interview dengan Ibu Ernita selaku bagian Penindakan BBPOM Bandung, pada 10 Mei 2022

⁵⁴ Hasil interview dengan Bapak Naufal, selaku bagian Penindakan BBPOM Semarang, pada 23 Juni 2022

ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) atau Serah Tahap I. Apabila berkas perkara lengkap oleh JPU, akan dilanjutkan penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU melalui Korwas PPNS yang disebut sebagai Serah Tahap II.⁵⁵

BBPOM Bandung, Surabaya, dan LOKA Surakarta juga mengkonfirmasi, selain pengawasan dan penindakan, edukasi kepada masyarakat pun dilakukan secara paralel melalui Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Program KIE menargetkan berbagai lapisan masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang pendidikan, contohnya edukasi ke sekolah, pasar, pemukiman penduduk, sampai media sosial khususnya *Instagram*.⁵⁶ Program KIE bertujuan untuk memberi pemahaman pada masyarakat melalui sosialisasi, penyebaran informasi, bimbingan teknis secara luring atau daring.⁵⁷ Melalui program KIE, terlihat pemahaman konsumen atas produk seperti suplemen, obat tradisional, makanan, juga kosmetik yang hendak dikonsumsi. Terdapat berbagai respon masyarakat yang mengikuti program KIE, dari mendengar saja sampai dengan memberikan pertanyaan yang kritis.⁵⁸

Melalui wawancara ini, disimpulkan bahwa BPOM pusat sudah memiliki berbagai cara dan sarana untuk mengedukasi bukan hanya pelaku usaha agar mengedarkan produk

dengan izin edar, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen, dari hulu sampai ke hilir. Konsumen memegang peranan penting dalam peredaran produk tanpa izin edar karena apabila ada konsumen yang membeli, secara otomatis produk tanpa izin edar akan terus diperjualbelikan. Komponen terpenting yaitu meningkatkan *awareness* konsumen. Dari hasil wawancara terdapat temuan yang menarik bahwa tiap UPT BPOM di daerah memiliki fokus pengaduan produk berbeda, BBPOM Bandung dan Semarang lebih banyak fokus pada kosmetik tanpa izin edar, sedangkan BBPOM Surabaya dan LOKA Surakarta fokus pada obat tradisional tanpa izin edar.

Guna memperkuat pengawasan transaksi daring, BPOM mengeluarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 (PerBPOM 8/2020), yang mencakup aspek pencegahan dan penindakan dengan mekanisme *business to consumer*, yang berarti pengawasan dari pelaku usaha sampai saat produk diterima konsumen. Tujuannya untuk melindungi konsumen yang membeli dan menggunakan produk yang berasal dari toko *online*.⁵⁹ Pada 18 Juni 2020, BPOM menyelenggarakan sosialisasi mengenai PerBPOM 8/2020 secara luring dan daring, dengan peserta kurang lebih 300 orang yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI),

⁵⁵ Hasil interview dengan Bapak Naufal, selaku bagian Penindakan BBPOM Semarang, pada 23 Juni 2022

⁵⁶ Hasil interview dengan Bapak Singgih selaku Bagian Informasi dan Komunikasi LOKA Surakarta, pada 2 Juni 2022.

⁵⁷ Hasil interview dengan Ibu Meliza selaku Bagian Informasi dan Komunikasi BBPOM Surabaya, pada 6 Juni 2022

⁵⁸ Hasil interview dengan Bapak Singgih selaku, Bagian Informasi dan Komunikasi Infokom LOKA Surakarta, pada 2 Juni 2022

⁵⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik, *PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING* (Indonesia, 2020).

Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPMI), *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG), dan *Indonesian E-Commerce Association* (idEA).⁶⁰ Kegiatan ini diselenggarakan untuk membahas pengawasan yang dibutuhkan demi mencegah risiko yang tidak diinginkan.⁶¹ Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyatakan bahwa peraturan ini untuk menguatkan komitmen BPOM agar masyarakat terlindungi dari obat dan vitamin agar sesuai dengan kriteria keamanan, khasiat, manfaat, dan mutunya.⁶²

2. E-Commerce Tokopedia

Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang melayani lebih dari 11 juta penjual dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan melalui bisnis *e-commerce* yang bersifat *User Generated Content*, atau konten buatan pengguna yang dipublikasikan dalam sebuah sistem. Setidaknya lebih dari 550 juta produk yang diunggah, ditawarkan, dan diperjualbelikan secara mandiri oleh pengguna dan penjual Tokopedia.⁶³ Tokopedia telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi kekayaan intelektual (HAKI) secara khusus merek dan hak cipta, termasuk mengidentifikasi produk dengan cara lebih detail guna mengurangi

risiko produk tanpa izin edar melalui edukasi secara berkala kepada penjual dan pembeli di platform, memfasilitasi saluran pelaporan bagi pengguna untuk secara berkala menghapus produk yang melanggar HAKI, serta juga penerapan sanksi berupa penutupan toko kepada penjual yang gagal memenuhi ketentuan terkait HAKI. Selain itu, Tokopedia memiliki beberapa program khusus terkait upaya memberantas peredaran produk tanpa izin yaitu:

a. Tokopedia Brand Alliance Program

Program ini merupakan kerjasama Tokopedia dengan para pemegang HAKI dalam menangani penjualan barang palsu.⁶⁴ Melalui program ini, para anggota dapat mengajukan laporan pelanggaran HAKI yang akan ditangani oleh *Tokopedia Anti-Counterfeit Team* maksimal dalam 3 hari kerja untuk dapat ditarik datanya dari penjualan.⁶⁵ Para anggota program dapat memberikan kriteria penilaian dalam proses identifikasi barang palsu di mana Tokopedia akan menyediakan informasi potensial barang palsu yang dijual di platform Tokopedia. Untuk menjadi bagian dari program ini, calon anggota wajib mendaftar dengan melampirkan dokumen legalitas misalnya sertifikat merek/hak cipta,

⁶⁰ Humas Badan POM, "Minimalisir Potensi Penyalahgunaan Obat Daring, Badan POM Gelar Sosialisasi Peraturan Nomor 8 Tahun 2020," last modified 2020, accessed April 4, 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19059/Minimalisir-Potensi-Penyalahgunaan-Obat-Daring--Badan-POM-Gelar-Sosialisasi-Peraturan-Nomor-8-Tahun-2020.html>.³⁰ Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

⁶¹ Ibid.

⁶² Humas Badan POM, "Badan POM Terbitkan Peraturan Peredaran Obat Dan Makanan Online," last modified 2020, accessed April 4, 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18692/Badan-POM-Terbitkan-Peraturan-Peredaran-Obat-dan-Makanan-Online.html>.

⁶³ Tokopedia, "Perlindungan Kekayaan Intelektual," accessed February 2, 2022, <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual>.

⁶⁴ Tokopedia, "Brand Alliance - Perlindungan Kekayaan Intelektual," accessed February 2, 2022, <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/brand-alliance>.

⁶⁵ Ibid.

izin berusaha dan tanda pengenal. Sejak tahun 2021, program ini hanya bisa diikuti melalui jalur undangan.⁶⁶

b. Authorized Seller Program⁶⁷

Program kepada pemegang HAKI untuk memperkuat jaringan penjual resmi di platform Tokopedia. Melalui program ini, pelanggan Tokopedia memiliki lebih banyak pilihan penjual yang menjual produk asli, sekaligus menciptakan ekosistem *e-commerce* yang lebih aman. Bentuk program ini berupa penawaran kepada penjual yang berisi informasi Pemegang HAKI yang dapat dihubungi.

Konsekuensi adanya pelanggaran kekayaan intelektual (hak cipta atau merek⁶⁸) dalam platform Tokopedia yaitu dapat dibagi menjadi beberapa tahapan:⁶⁹

(1) Penghapusan Produk oleh Tokopedia

Penghapusan produk bisa berasal dari laporan pemegang HAKI ataupun temuan tim Tokopedia. Selain penghapusan produk, penjual akan mendapat *penalty point*. *Penalty Point* adalah sistem yang menghitung pelanggaran oleh penjual Tokopedia. Akumulasi poin/skor dapat menyebabkan sanksi moderasi toko sementara hingga permanen.

Sistem *Penalty Point* dibentuk untuk mencegah toko yang sama melanggar syarat dan ketentuan HAKI secara berulang. Dengan adanya laporan ini maka penjual tidak dapat menjual produk baru yang serupa dengan yang dilaporkan. Jika penjual tetap mengunggah produk serupa, maka produk tersebut nantinya tidak dapat ditemukan di halaman toko maupun pencarian Tokopedia.

(2) Moderasi Toko

Apabila toko telah mencapai ambang batas *penalty point* yang ditentukan, maka toko akan dimoderasi sementara. Moderasi Toko adalah sanksi yang diberikan pada penjual yang memiliki akumulasi skor *Penalty Point* hingga ambang batas tertentu. Toko yang telah dimoderasi tidak dapat melakukan transaksi baru dan tidak dapat ditemukan di halaman hasil pencarian platform Tokopedia. Apabila penjual melakukan pelanggaran berulang, maka akan dilakukan moderasi permanen.⁷⁰

3. Konsumen

Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk memilih obat dan makanan yang mereka konsumsi.⁷¹ Dari sisi konsumen,

⁶⁶ Tokopedia, "Bagaimana Cara Bergabung Ke Brand Alliance Program?," <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/brand-alliance/bergabung>.

⁶⁷ Tokopedia, "Apa Itu Authorized Seller Program?," accessed February 2, 2022, <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/brand-alliance/asp>.

⁶⁸ Tokopedia, "Apa Itu Kekayaan Intelektual?," accessed February 2, 2022, <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/pencegahan>; Tokopedia, "Konsekuensi Apabila Produk Melanggar Kekayaan Intelektual (KI)," accessed February 2, 2022, <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/konsekuensi>.Ibid.

⁶⁹ Tokopedia, "Konsekuensi Apabila Produk Melanggar Kekayaan Intelektual (KI)."

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Humas Badan POM, "Jadi Konsumen Cerdas Dan Berdaya Dengan Cek KLIK," last modified 2019, accessed March 4, 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/494/Jadi-Konsumen-Cerdas-dan-Berdaya-dengan-Cek-KLIK.html>.

sebelum membeli produk tertentu sebaiknya memeriksa apakah produk yang ingin dibeli sudah atau belum memiliki izin edar melalui aplikasi BPOM *Mobile*. Aplikasi BPOM *Mobile* ini memberi kemudahan dalam mengecek produk Obat dan Makanan melalui *scanning* 2D *barcode* pada label produk.⁷² Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan dan mendapatkan informasi terkini dari BPOM.⁷³ Melalui kampanye Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluwarsa) serta Aplikasi BPOM *Mobile*, BPOM berusaha untuk meningkatkan *awareness* masyarakat untuk selalu memilih sebelum membeli dan terlebih mengonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman.⁷⁴ Setelah barang diterima, kemudian konsumen dapat memeriksa keaslian melalui *scan QR code* dari kemasan produk. Jika *scan*

QR code tidak dimungkinkan, konsumen dapat mengetik nomor izin edar yang tertera. Melalui cara ini, konsumen dapat merasa lebih aman dalam melakukan pembelian dari berbagai *e-commerce*. Fitur cek produk BPOM menampilkan nomor registrasi dari setiap produk obat dan makanan yang sudah diawasi oleh BPOM. Informasi dari cara cek BPOM *online* akan muncul data seperti pihak pendaftar, jenis produk, merek, dan nama produk, jenis produk.

Akan tetapi, belum semua produk vitamin memiliki label atau *QR code* untuk bisa di *scan*, melainkan perlu memasukkan nomor izin edar yang tertera di produk secara manual. Sebagai perbandingan, penulis akan melampirkan contoh gambar produk vitamin yang asli berasal dari Australia dan sudah diproduksi di Indonesia:

Blackmores Odourless Fish Oil 1000 - 200 kapsul (di Australia)⁷⁵



Blackmores Odourless Fish Oil 1000 - 200 kapsul (di Indonesia)⁷⁶



⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Blackmores Au, "Blackmores Australia," accessed February 5, 2022, <https://www.blackmores.com.au/>.

⁷⁶ Blackmores Id, "Blackmores Indonesia," accessed February 5, 2022, <https://www.blackmores.co.id/produk>.

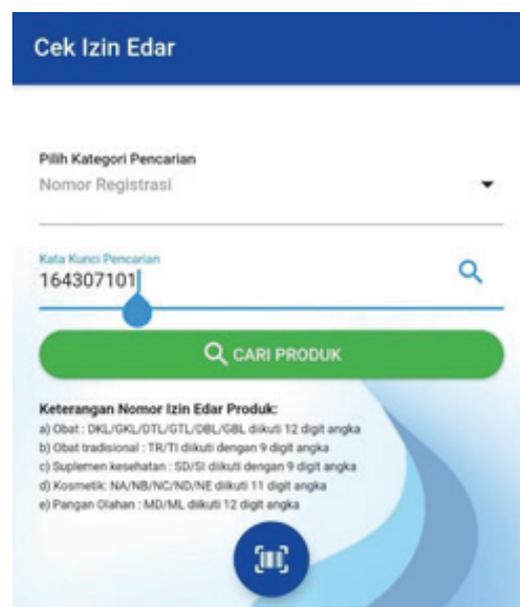
Dari kedua gambar produk di atas, perbedaan vitamin yang beredar di Indonesia memiliki nomor POM pada bagian depan label

produk vitamin tersebut. Kemudian nomor POM tersebut dapat diperiksa di di aplikasi “BPOM Mobile” sebagai berikut:

a. Nomor POM yang tertera di label produk.



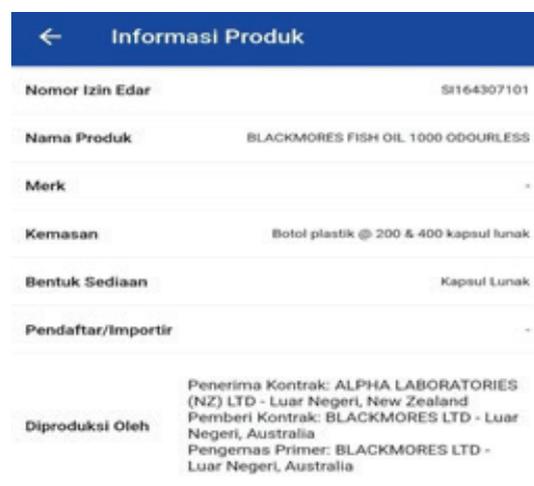
b. Buka aplikasi “BPOM Mobile”, pilih “Pencarian”, kemudian pada bagian “Pilih Kategori Pencarian pilih “Nomor Registrasi”, dan kemudian ketik nomor POM yang tertera pada label produk.



c. Kemudian setelah “Cari Produk” akan keluar informasi seperti yang tertera pada gambar.



d. Setelah itu klik “Hasil Pencarian” dan akan langsung muncul informasi yang berkaitan dengan produk.



Contoh lainnya yaitu vitamin merek *Swisse*, yang diproduksi dan diimpor langsung dari Australia. *Blackmores* yang beredar di Indonesia izin impornya dimiliki oleh PT Kalbe sehingga pada label *Blackmores* Indonesia bertuliskan “KALBE”. *Swisse* sama seperti *Blackmores*, label produk yang diperjualbelikan di Indonesia tidak memiliki QR code BPOM, sehingga perlu untuk dicari secara manual pada aplikasi BPOM Mobile.

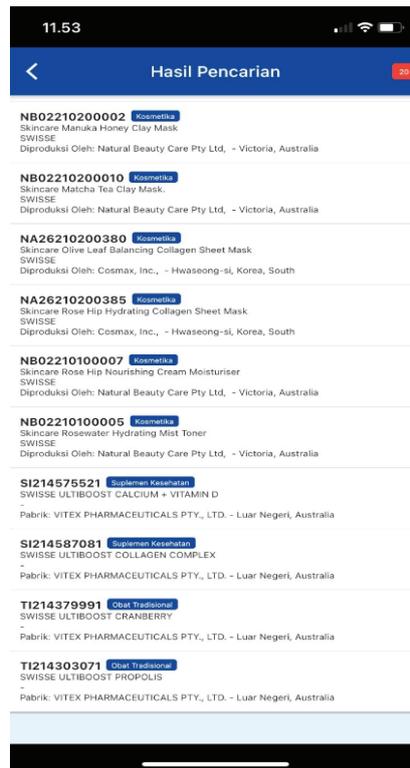
Perbedaan antara *Swisse* dengan *Blackmores* yaitu, produk *Swisse* memiliki

proteksi tambahan ketimbang *Blackmores* di mana produk *Swisse* memiliki QR code tersendiri dari perusahaan mereka (*Vitex Pharmaceuticals PTY., LTD*) untuk memeriksa produk *Swisse* yang dibeli asli. Terdapat 2 (dua) cara yaitu: pertama, melalui aplikasi “*Swisse Scan Apps*”, apabila produk asli maka akan ada tulisan “*CONFIRMED: Authentic Swisse Product*”. Kemudian kedua, melalui *authenticity code* di website untuk verifikasi.

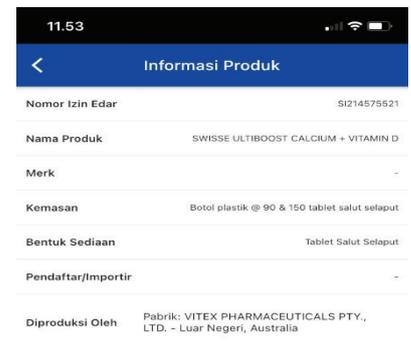
a. Produk dicari pada BPOM Mobile.



b. Hasil Pencarian di BPOM Mobile.



c. Informasi produk *Swisse* “*Ultiboost Calcium + Vitamin D*”.



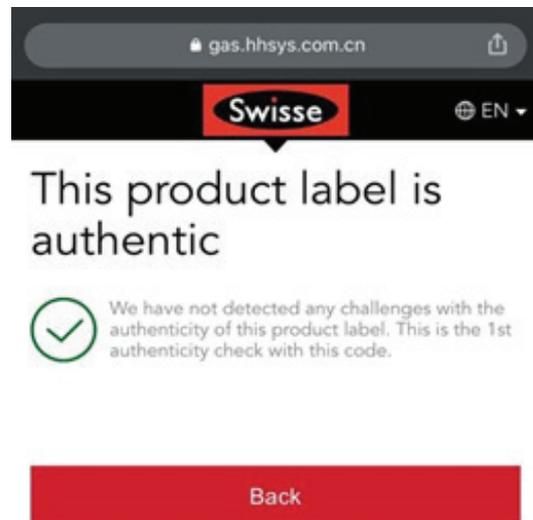
Berikut terlampir tahapan-tahapan tersebut:

- a. Contoh QR code yang terletak pada bagian belakang produk.
- b. Melalui aplikasi “Swisse Scan Apps”, di tampilan ini, konsumen dapat klik “scan”, dan arahkan pada QR tersebut.
- c. Konfirmasi hasil bahwa produk Swisse *authentic*.



Keterangan gambar: cara pertama dengan aplikasi.

- a. Halaman awal *website* untuk *check* produk
- b. Apabila produk tersebut asli dan baru pertama kali diperiksa keasliannya.



- c. Hasil yang tertera apabila produk sudah kedua kalinya diperiksa keasliannya.
- d. Hasil yang tertera apabila produk sudah ketiga kalinya diperiksa keasliannya.

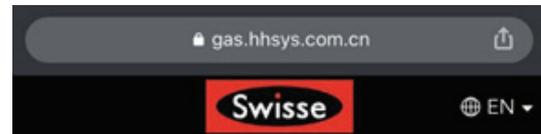


This product label is authentic



We have not detected any challenges with the authenticity of this product label. This is the **2** authenticity check with this code.

Back



This product label is authentic



We have not detected any challenges with the authenticity of this product label. This is the **3** authenticity check with this code.

Back

Keterangan gambar: cara kedua dengan menggunakan *authenticity code* yang tertera di kemasan produk.

Dari penjabaran contoh vitamin merek *Blackmores* dan *Swisse* di atas, kedua vitamin memiliki sistem pengamanan yang berbeda, tetapi baik *Blackmores* dan *Swisse*, sama-sama tidak ada memiliki *QR code* BPOM di kemasan produknya. Akan tetapi, *Swisse* memiliki pengamanan tambahan melalui *QR code* tersendiri untuk diperiksa di aplikasi atau *website*. Terlihat bahwa konsumen dapat lebih aktif mencari tahu apakah produk yang dibeli sudah terdaftar dan memiliki izin edar di BPOM, jangan sampai konsumen mengonsumsi vitamin tanpa izin edar karena dapat berbahaya.

4. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)

idEA merupakan asosiasi yang terdiri dari pelaku industri *e-commerce* Indonesia, yang

resmi didirikan bulan Mei 2012 di Jakarta. Penggagas idEA terdiri dari 9 (sembilan) perusahaan besar *e-commerce* Indonesia, yaitu BLANJA.com; OLX.co.id; Berniaga.com; blibli.com; Kaskus.com; Multiply.com; Gramedia.com; dan Tokopedia.com.⁷⁷ idEA berperan sebagai jembatan untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah maupun dengan asosiasi lain sebagai faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri *e-commerce*. Mengingat pentingnya ekosistem yang aman dalam transaksi *e-commerce*, sebagai bentuk dukungan pemberantasan produk yang melanggar HAKI, idEA bersama dengan para anggotanya sepakat untuk melakukan 5 langkah yaitu:⁷⁸

- a. Mendukung penegakan hukum di bidang HAKI;

⁷⁷ Indonesian E-Commerce Association, "Tentang Kami - Asosiasi E-Commerce Indonesia," accessed April 27, 2022, <https://idea.or.id/about-us?lang=id>.

⁷⁸ Eko Nordiansyah, "Jamin Hak Kekayaan Intelektual, E-Commerce Perangi Peredaran Barang Palsu," last modified 2021, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/jamin-hak-kekayaan-intelektual-e-commerce-perangi-peredaran-barang-palsu/ar-AAQZKBr>.

- b. Mendorong para penjual, pemilik lapak, dan *merchant* yang menjadi mitra bisnis *e-commerce* untuk memasarkan barang dan jasa yang sudah memiliki HAKI;
- c. Mengedukasi penjual terkait HAKI;
- d. Penyediaan mekanisme pengaduan agar pemilik HAKI bisa mengadukan pelanggaran kepada *e-commerce* untuk ditindaklanjuti;
- e. Berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya aparat penegakan hukum dalam bentuk penyediaan informasi.

Dalam perjalanannya, idEA bekerja sama dengan BPOM untuk menindaklanjuti penjualan produk yang ada di bawah kewenangan BPOM. Ketua idEA Bima Laga mengatakan, idEA telah bekerja sama dengan BPOM untuk memberantas peredaran obat dan vitamin tanpa izin edar sejak 2019 yang mana baru diperpanjang melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada 27 Mei 2022 lalu.⁷⁹ Pokok-pokok kerja sama dalam MoU ini mencakup kerjasama penarikan konten (*take down*) tautan barang yang diduga tidak memiliki izin edar, kolaborasi dengan otoritas terutama otoritas

penegakan hukum, sampai dengan kerja sama pemberian edukasi pada *seller* mengingat mayoritas *e-commerce* yang ada di Indonesia bersifat *user generate content*.⁸⁰ Dalam implementasinya, BPOM melalui Direktorat Siber secara rutin melakukan patroli siber di *e-commerce* yang kemudian daftar temuan ini setiap minggunya diteruskan kepada idEA sebagai fasilitator untuk ditindaklanjuti oleh *e-commerce* seperti Tokopedia hingga Bukalapak.⁸¹ Data per tahun 2021, sudah ada sekitar 200 ribu tautan yang ditarik dari peredaran.⁸² Selain kerja sama dengan BPOM, idEA juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan yang fokus pada transaksi *e-commerce*.⁸³ Mekanisme yang diberlakukan pun sama, Ditjen PKTN akan mengirimkan tautan produk kepada idEA lalu diteruskan ke anggota.⁸⁴ Pada tahun 2021 lalu, idEA menerima pengaduan sebanyak 9.393 pengaduan.⁸⁵

Mengenai teknis pelaksanaan, sesuai dengan Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020, *e-commerce* wajib untuk melakukan *take down* tautan barang tanpa izin edar dalam jangka waktu 1x24 jam.⁸⁶ BPOM pun aktif

⁷⁹ Indonesian E-Commerce Association, "Perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) BPOM RI Dengan IdEA," accessed April 27, 2022, <https://idea.or.id/artikel/perpanjangan-nota-kesepahaman-mou-bpom-ri-dengan-idea?lang=id>.

⁸⁰ Hasil Interview dengan Bapak Rofi, Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan, Asosiasi E-Commerce Indonesia pada tanggal 10 Juni 2022.

⁸¹ Abdul Azis Said, "BPOM Patroli Obat Dan Vitamin Ilegal Di E-Commerce Tiap Minggu," *Kata Data*, last modified 2021, accessed January 27, 2022, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/615d7ab6e64ef/bpom-patroli-obat-dan-vitamin-ilegal-di-e-commerce-tiap-minggu>.

⁸² Hasil Interview dengan Bapak Rofi, Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan, Asosiasi E-Commerce Indonesia pada tanggal 10 Juni 2022

⁸³ Pelita Online, "PTKN Kemendag Peringati Harkonas 2022, Wamendag; Konsumen Agen Perubahan Ekonomi Indonesia," last modified 2022, <https://pelitaonline.co/ptkn-kemendag-peringati-harkonas-2022-wamendag-konsumen-agen-perubahan-ekonomi-indonesia/>.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Hasil Interview dengan Bapak Rofi, Head of Public Policy and Government Relations, Asosiasi E-Commerce Indonesia pada tanggal 10 Juni 2022.

mengawasi proses *take down* yang dilakukan oleh *e-commerce*⁸⁷ dan berkoordinasi juga dengan aparat penegak hukum guna memantau *e-commerce* agar peredaran *online* sesuai aturan.⁸⁸

Berdasarkan hasil observasi idEA, agar pemberantasan semakin optimal, konsumen perlu mengetahui risiko yang mungkin dialaminya. Dengan kata lain, konsumen harus bisa mengisi gap pengetahuan dengan riset mendalam sebelum berbelanja *online*. Riset dapat fokus pada beberapa hal, perbandingan

harga *seller* lain dengan *official store*, *review* pembeli, sampai dengan reputasi toko.

Sehubungan dengan harga, idEA juga menyoroti pentingnya untuk memeriksa harga produk apakah wajar. Maraknya peredaran produk tanpa izin edar kerap terjadi karena masyarakat cenderung memilih produk dengan harga yang murah. Sebagai contoh, Tim Peneliti melakukan komparasi harga vitamin yang diperjualbelikan di beberapa *e-commerce* dibandingkan dengan *official store*:

No.	Nama Vitamin	Nama Toko	Shopee	Tokopedia	Official store
1.	PLANT BASED K2 + D3 Original 2 in 1 Formula, Formulated With Coconut Oil, 100MCG K2 125 MCG D3	Fitri_beauty99	Terjual : 1.8rb+ Harga : Rp110.000 ⁸⁹		Store : iherb Harga : 301.160 ⁹⁰
		herbalindonesia88	Terjual : 3rb Harga : Rp80.000 ⁹¹		
2.	VITAMIN Bronson K2+D3 (120 count)	elsa.herbal.original;	Terjual : 70 Harga : Rp100.000 ⁹²	Terjual : 90+ Harga : Rp385.000 ⁹³	Store : walmart Harga : \$24,99 Rp358.356,6 ⁹⁴ (kurs : Rp14.340)
		Gudang lotus			

⁸⁷ Hasil Interview dengan Bapak Rofi, Head of Public Policy and Government Relations, Asosiasi E-Commerce Indonesia pada tanggal 10 Juni 2022.

⁸⁸ Said, "BPOM Patroli Obat Dan Vitamin Ilegal Di E-Commerce Tiap Minggu."

⁸⁹ Fitri_beauty99, "PLANT BASED K2 + D3 Original 2 in 1 Formula, Formulated With Coconut Oil, 100MCG K2 | 125 MCG D3," https://shopee.co.id/PLANT-BASED-K2-D3-Original-2-in-1-Formula-Formulated-With-Coconut-Oil-100MCG-K2-125-MCG-D3-i.283255851.9273758518?sp_atk=17e8ecd0-70b3-439c-aef4-1b167533f472.

⁹⁰ iherb, "Sports Research, Vitamin K2 + D3, 60 Kapsul Gel Lunak Veggie," <https://id.iherb.com/pr/sports-research-vitamin-d3-k2-plant-based-60-veggie-softgels/79975>.

⁹¹ herbalindonesia88, "VITAMIN K2 + D3 PLANT BASED 2-IN-1 SUPPORT ISI 60 SOFTGEL COCONUT OIL ORIGINAL BPOM," [https://shopee.co.id/VITAMIN-K2-D3-PLANT-BASED-2-IN-1-SUPPORT-ISI-60-SOFTGEL-COCONUT-OIL-ORIGINAL-BPOM-i.231847880.9172957724?sp_atk=0e7a8524-d0c3-480e-aa94-cbc1eeac5f47&xptdk=0e7a8524-d0c3-480e-aa94-cbc1eeac5f47https%3A%2F%2Fshopee.co.id%2FVITAMIN-](https://shopee.co.id/VITAMIN-K2-D3-PLANT-BASED-2-IN-1-SUPPORT-ISI-60-SOFTGEL-COCONUT-OIL-ORIGINAL-BPOM-i.231847880.9172957724?sp_atk=0e7a8524-d0c3-480e-aa94-cbc1eeac5f47&xptdk=0e7a8524-d0c3-480e-aa94-cbc1eeac5f47https%3A%2F%2Fshopee.co.id%2FVITAMIN-.).

⁹² elsa.herbal.original, "VITAMIN Bronson K2+D3 2 in 1 Support 100% ORIGINAL," https://shopee.co.id/VITAMIN-Bronson-K2-D3-2-in-1-Support-100-ORIGINAL-i.435879995.11147039046?sp_atk=580969bd-9247-4968-b4a2-8acb327bac9c.

⁹³ Gudang Lotus, "Bronson Vitamin K2 D3 5000 10000 IU Vit K-2 D-3 - K2D3 5000 250," <https://www.tokopedia.com/gudanglotus/bronson-vitamin-k2-d3-5000-10000-iu-vit-k-2-d-3-k2d3-5000-250?src=topads>.

⁹⁴ Walmart, "Bronson Vitamin K2 (MK7) with D3 Extra Strength Supplement Bone and Heart Health Non-GMO Formula 10,000 IU Vitamin D3 & 120 Mcg Vitamin K2 MK-7 Easy to Swallow Vitamin D & K, 120 Capsul," <https://www.walmart.com/ip/Bronson-Vitamin-K2-MK7-D3-Extra-Strength-Supplement-Bone-Heart-Health-Non-GMO-Formula-10-000-IU-120-mcg-MK-7-Easy-Swallow-D-K-Capsul/224858315>.

Pada dasarnya, transaksi *e-commerce* sebagai pihak ketiga sudah lebih aman jika dibandingkan dengan media sosial seperti *Instagram* atau *Whatsapp* karena *e-commerce* berperan sebagai penengah jika ada masalah, namun tentu saja peran *e-commerce* harus diikuti dengan konsumen yang kritis dan proaktif.

D. Penutup

Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam penjualan melalui *e-commerce*, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini BPOM tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini secara sendiri. Namun, dengan adanya koordinasi beberapa pemangku kepentingan, termasuk konsumen, hal ini dapat direalisasikan. Walaupun sampai saat ini pemberantasan penjualan vitamin yang tidak memiliki izin edar masih belum bisa dihapuskan sepenuhnya, paling tidak upaya pemberantasan secara nyata telah berlangsung melalui kerja sama berbagai pihak. Berbagai kerja sama ini tentunya perlu diapresiasi mengingat banyaknya vitamin tanpa izin edar yang dijual di *e-commerce*. Menjadi konsumen pintar memang merupakan hal mendesak mengingat teori ekonomi klasik, penawaran ada karena adanya permintaan. Jika konsumen sudah lebih cerdas dalam melakukan pembelian vitamin, tentunya peredaran vitamin tanpa izin edar dapat ditekan karena para konsumen hanya ingin membeli vitamin yang memiliki izin edar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

Barkatullah, Abdulhalim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. (Bandung, Penerbit NusaMedia, 2017).

Nugrahaningsih, Widi dan Ernawati, Mira. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. (Sukoharjo, CVPustakaBengawan, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Wawancara

Bapak M. Fajar Arifin selaku Kepala LOKA POM Surakarta

Bapak Naufal, selaku bagian Penindakan BBPOM Semarang

Bapak Rofi, Head of Public Policy and Government Relations, idEA

Bapak Singgih selaku Bagian Informasi dan Komunikasi LOKA Surakarta

Ibu Ernita, selaku bagian Penindakan BBPOM Bandung

Ibu Meliza, selaku bagian Informasi dan Komunikasi Infokom BBPOM Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik. *KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.23.3644 TENTANG KETENTUAN POKOK PENGAWASAN SUPLEMEN MAKANAN*. Indonesia, 2004.

———. *PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN*. Indonesia, 2020.

———. *PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING*. Indonesia, 2020.

———. *Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan*

Pengawas Obat Dan Makanan (PerBPOM 22/2020). Indonesia, 2020.

— — —. *PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA*, 2017.

— — —. Presiden Republik. *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN*. Indonesia, 2017.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Indonesia, 2009.

— — —. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia, 1999.

Situs Daring

Abdila, Reynas. "YLKI: Pengaduan Obat Vitamin Palsu Masuk Dua Besar." *Tribun*. Last modified 2021. Accessed January 20, 2022. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/18/ylki-pengaduan-obat-vitamin-palsu-masuk-dua-besar>.

Akbar, Caesar. "Shopee Bakal Tutup Toko Yang Jual Obat Dan Vitamin Palsu." Accessed October 27, 2021. https://bisnis.tempo.co/read/1484322/shopee-bakal-tutup-toko-yang-jual-obat-dan-vitamin-palsu?page_num=2.

Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Rechtsvinding* 1, no. 1 (2012): 23.

Badan Pemeriksa Obat dan Makanan; *Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan*, n.d. Accessed March 19, 2022. https://qms.pom.go.id/sites/default/files/QSC_01830_Direktorat_Penyidikan_Obat_dan_Makanan.pdf.

Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. "Mengenal UPT Lingkungan Badan POM." Last modified 2022. Accessed March 29, 2022. <https://www.instagram.com/p/CfVhgOwvrdN/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik. "Direktorat Cegah Tangkal." Accessed March 19, 2022. <https://www.instagram.com/p/CDa36bppGI4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

— — —. *Direktorat Intelegen Pengawas Obat Dan Makanan*, n.d. Accessed March 19, 2022.

<https://www.instagram.com/p/CDa36bppGI4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

— — —. *Direktorat Siber Obat Dan Makanan*, n.d. Accessed March 19, 2022. https://www.pom.go.id/new/files/2022/RKT/Pusat/RKT_Direktorat_Siber_Obat_dan_Makanan_2022.pdf.

— — —. *KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.23.3644 TENTANG KETENTUAN POKOK PENGAWASAN SUPLEMEN MAKANAN*. Indonesia, 2004.

— — —. *Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik*, n.d. <https://www.pom.go.id/new/files/2018/pedoman/indonesia-gmp-guideline.pdf>.

— — —. *PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN*. Indonesia, 2020.

— — —. *PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING*. Indonesia, 2020.

— — —. *Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (PerBPOM 22/2020)*. Indonesia, 2020.

Blackmores Au. "Blackmores Australia." Accessed February 5, 2022. <https://www.blackmores.com.au/>.

Blackmores Id. "Blackmores Indonesia." Accessed February 5, 2022. <https://www.blackmores.co.id/produk>.

BPOM. "Waspada Obat Palsu Dan Obat Online" (n.d.). <https://www.pom.go.id/new/browse/more/issue/12>.

BPOM, SIREKA. "PROFIL DIREKTORAT." Accessed March 5, 2022. <https://sireka.pom.go.id/general/profile>.

Catriana, Elsa. "Tokopedia Tutup Puluhan Ribu Toko Yang Terbukti Jual Vitamin Palsu." *Kompas*. Last modified 2021. Accessed November 27, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/09/15/162122126/tokopedia-tutup-puluhan-ribu-toko-yang-terbukti-jual-vitamin-palsu>.

Damar, Agustinus Mario. "Waspada Peredaran Vitamin Palsu, Begini Modus Penjualannya" (n.d.). <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4609938/waspada-peredaran-vitamin-palsu-begini-modus-penjualannya>.

- Dikarma, Kamran. "113 Ribu Situs Penjual Obat Dan Produk Medis Palsu Ditutup." *Republika*. Last modified 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qudzz3382/113-ribu-situs-penjual-obat-dan-produk-medis-palsu-ditutup>.
- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. "Kenali Suplemen Kesehatan." Accessed March 5, 2022. <https://ditwasotsk.pom.go.id/post/kenali-suplemen-kesehatan>.
- Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. "Tugas Pokok Dan Fungsi." Accessed March 5, 2022. <https://standarpangan.pom.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- elsa.herbal.original. "VITAMIN Bronson K2+D3 2 in 1 Support 100% ORIGINAL." https://shopee.co.id/VITAMIN-Bronson-K2-D3-2-in-1-Support-100-ORIGINAL-i.435879995.11147039046?sp_atk=580969bd-9247-4968-b4a2-8acb327bac9c&xptdk=580969bd-9247-4968-b4a2-8acb327bac9c.
- Fitri_beauty99. "PLANT BASED K2 + D3 Original 2 in 1 Formula, Formulated With Coconut Oil, 100MCG K2 | 125 MCG D3." https://shopee.co.id/PLANT-BASED-K2-D3-Original-2-in-1-Formula-Formulated-With-Coconut-Oil-100MCG-K2-125-MCG-D3-i.283255851.9273758518?sp_atk=17e8ecd0-70b3-439c-aef4-1b167533f472.
- herbalindonesia88. "VITAMIN K2 + D3 PLANT BASED 2-IN-1 SUPPORT ISI 60 SOFTGEL COCONUT OIL ORIGINAL BPOM." https://shopee.co.id/VITAMIN-K2-D3-PLANT-BASED-2-IN-1-SUPPORT-ISI-60-SOFTGEL-COCONUT-OIL-ORIGINAL-BPOM-i.231847880.9172957724?sp_atk=0e7a8524-d0c3-480e-aa94-cbc1eeac5f47&xptdk=0e7a8524-d0c3-480e-aa94-cbc1eeac5f47https%3A%2F%2Fshopee.co.id%2FVITAMIN-.
- Humas Badan POM. "Badan POM Terbitkan Peraturan Peredaran Obat Dan Makanan Online." Last modified 2020. Accessed April 4, 2022. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18692/Badan-POM-Terbitkan-Peraturan-Peredaran-Obat-dan-Makanan-Online.html>.
- . "Jadi Konsumen Cerdas Dan Berdaya Dengan Cek KLIK." Last modified 2019. Accessed March 4, 2022. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/494/Jadi-Konsumen-Cerdas-dan-Berdaya-dengan-Cek-KLIK.html>.
- . "Minimalisir Potensi Penyalahgunaan Obat Daring, Badan POM Gelar Sosialisasi Peraturan Nomor 8 Tahun 2020." Last modified 2020. Accessed April 4, 2022. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19059/Minimalisir-Potensi-Penyalahgunaan-Obat-Daring--Badan-POM-Gelar-Sosialisasi-Peraturan-Nomor-8-Tahun-2020.html>.
- iherb. "Sports Research, Vitamin K2 + D3, 60 Kapsul Gel Lunak Veggie." <https://id.iherb.com/pr/sports-research-vitamin-d3-k2-plant-based-60-veggie-softgels/79975>.
- Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik. *PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA*, 2017.
- Indonesia, Presiden Republik. *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN*. Indonesia, 2017.
- Indonesian E-Commerce Association. "Perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) BPOM RI Dengan IdEA." Accessed April 27, 2022. <https://idea.or.id/artikel/perpanjangan-nota-kesepahaman-mou-bpom-ri-dengan-idea?lang=id>.
- . "Tentang Kami - Asosiasi E-Commerce Indonesia." Accessed April 27, 2022. <https://idea.or.id/about-us?lang=id>.
- Integrity Indonesia. "Kerugian Karena Obat Palsu Capai 46 Milyar Rupiah." Accessed November 27, 2021. <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/10/23/kerugian-karena-obat-palsu-capai-46-milyar-rupiah/>.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan*. Indonesia, n.d.
- Lotus, Gudang. "Bronson Vitamin K2 D3 5000 10000 IU Vit K-2 D-3 - K2D3 5000 250." <https://www.tokopedia.com/gudanglotus/bronson-vitamin-k2-d3-5000-10000-iu-vit-k-2-d-3-k2d3-5000-250?src=topads>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Nordiansyah, Eko. "Jamin Hak Kekayaan Intelektual, E-Commerce Perangi Peredaran Barang Palsu." Last modified 2021. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/jamin-hak-kekayaan-intelektual-e-commerce-perangi-peredaran-barang-palsu/ar-AAQZKBr>.
- Pelita Online. "PTKN Kemendag Peringati Harkonas 2022, Wamendag; Konsumen Agen Perubahan Ekonomi Indonesia." Last modified 2022. <https://pelitaonline.co/ptkn-kemendag-peringati-harkonas-2022-wamendag-konsumen-agen-perubahan-ekonomi-indonesia/>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Indonesia, 2009.
- . *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia, 1999.
- Safrezi, Fitra. "Makin Marak Peredaran Obat Dan Vitamin Palsu Di Masa Pandemi." *Kata Data*. Last modified 2021. Accessed September 2, 2021. <https://katadata.co.id/safrezifitra/indepth/613897dced0ea/makin-marak-peredaran-obat-dan-vitamin-palsu-di-masa-pandemi>.
- Said, Abdul Azis. "BPOM Patroli Obat Dan Vitamin Ilegal Di E-Commerce Tiap Minggu." *Kata Data*. Last modified 2021. Accessed January 27, 2022. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/615d7ab6e64ef/bpom-patroli-obat-dan-vitamin-ilegal-di-e-commerce-tiap-minggu>.
- Surabaya, Balai Besar POM. "Patroli Siber, Langkah Deteksi Dini Tingkatkan Efektifitas Pengawasan Obat Dan Makanan." Last modified 2020. Accessed April 3, 2022. Patroli Siber, Langkah Deteksi Dini Tingkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.
- Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Tokopedia. "Apa Itu Authorized Seller Program?" Accessed February 2, 2022. <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/brand-alliance/asp>.
- . "Apa Itu Kekayaan Intelektual?" Accessed February 2, 2022. <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/pencegahan>.
- . "Bagaimana Cara Bergabung Ke Brand Alliance Program?" <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/brand-alliance/bergabung>.
- . "Brand Alliance - Perlindungan Kekayaan Intelektual." Accessed February 2, 2022. <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/brand-alliance>.
- . "Konsekuensi Apabila Produk Melanggar Kekayaan Intelektual (KI)." Accessed February 2, 2022. <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/konsekuensi>.
- . "Perlindungan Kekayaan Intelektual." Accessed February 2, 2022. <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual>.
- Vidya, Vidya. "Vitamin Dan Suplemen Untuk Daya Tahan Tubuh." Last modified 2020. Accessed March 3, 2022. <https://medicastore.com/berita/2698/vitamin-dan-suplemen-untuk-daya-tahan-tubuh>.
- Walmart. "Bronson Vitamin K2 (MK7) with D3 Extra Strength Supplement Bone and Heart Health Non-GMO Formula 10,000 IU Vitamin D3 & 120 Mcg Vitamin K2 MK-7 Easy to Swallow Vitamin D & K, 120 Capsul." <https://www.walmart.com/ip/Bronson-Vitamin-K2-MK7-D3-Extra-Strength-Supplement-Bone-Heart-Health-Non-GMO-Formula-10-000-IU-120-mcg-MK-7-Easy-Swallow-D-K-Capsul/224858315>.
- "Badan Pengawas Obat Dan Makanan - Republik Indonesia." Accessed September 28, 2021. <https://www.pom.go.id/new/view/direct/structure>.